

Lemhannas Paparkan Capaian 2025 di Depan Komisi I DPR RI

Ibrahim - WARTAWAN.ORG

Jan 19, 2026 - 15:35



Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si

JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., bersama jajaran pimpinan lembaga, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) krusial dengan Komisi I DPR RI pada Senin (19/1/2026) di Gedung Nusantara II, Jakarta. Pertemuan ini menjadi ajang strategis untuk memaparkan capaian dan pelaksanaan program kerja Lemhannas RI sepanjang tahun anggaran 2025.

Dalam paparannya, Gubernur Aceh Hasan Syadzily menyoroti realisasi anggaran Lemhannas RI tahun 2025 yang mencapai 98,90 persen. Angka ini mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya dalam menjalankan berbagai program prioritas. Rinciannya, program pembinaan ketahanan nasional terealisasi 97,09 persen, program dukungan manajemen mencapai 99,71 persen, dan belanja pegawai menyentuh angka 99,05 persen.

Lebih mendalam, Gubernur memaparkan keberhasilan program pembinaan ketahanan nasional. Salah satu fokus utamanya adalah mempersiapkan dan memantapkan kader pimpinan nasional, sejalan dengan Asta Cita nomor empat yang menekankan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Melalui Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Lemhannas RI berhasil menghasilkan lulusan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXVIII sebanyak 110 orang, serta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXV dan XXVI yang masing-masing meluluskan 100 dan 89 orang. Menariknya, pada tahun 2025, Lemhannas RI menunjukkan komitmen inklusivitas dengan mengakomodir peserta dari kelompok difabel dan terus memperhatikan keseimbangan gender dalam program pendidikan pimpinan nasional ini.

Peran Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan juga menjadi sorotan. Deputi ini bertugas mencetak agen perubahan berkarakter, bermoral, dan beretika, yang memiliki wawasan kebangsaan kuat untuk memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan Asta Cita nomor 1 dan 8, yang bertujuan mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan, termasuk Pembinaan serta Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) yang berkolaborasi dengan berbagai organisasi, program 'Lemhannas Goes to Campus' untuk menumbuhkan cinta tanah air di kalangan generasi milenial dan Gen Z, 'Training of Trainer' bagi para pendidik, gebyar wawasan kebangsaan, dan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) angkatan kedua.

Kolaborasi strategis Lemhannas RI dengan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah, seperti Pemprov Jawa Timur dan Pemprov Jawa Tengah, melalui kegiatan KPPD dalam format 'Retret' kepala daerah, turut digalakkan. Tujuannya adalah membentuk pemimpin daerah yang berkarakter negarawan, berpikir komprehensif, integral, holistik, serta memiliki integritas dan profesionalisme. "Ke depan, kegiatan ini akan terus dilaksanakan untuk dapat mendukung terwujudnya kolaborasi dan kerja sama yang aktif antar pimpinan daerah dalam mendukung program pemerintah pusat dan daerah," ujar Gubernur Lemhannas RI.

Deputi Bidang Pengkajian Strategik turut berkontribusi signifikan dengan memberikan dua belas rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Rekomendasi ini berasal dari berbagai direktorat, mencakup isu ideologi dan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Selain itu, dua kajian spesifik mengenai peningkatan kompetensi SDM unggul dan konsolidasi demokrasi juga dihasilkan, bersamaan dengan asesmen krisis dan Jakarta Geopolitical Forum kesembilan.

Program pengukuran ketahanan nasional juga menunjukkan kemajuan.

Outputnya meliputi penyempurnaan pemodelan sistem pengukuran ketahanan nasional, perolehan indeks pengukuran ketahanan nasional dengan predikat 'cukup tangguh', pembentukan asesor kepemimpinan nasional, dan pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pengajar ketahanan nasional bekerja sama dengan BNSP untuk menjamin kualitas pengajar.

Gubernur Lemhannas RI juga memaparkan hasil capaian kinerja program dukungan Lemhannas RI yang berfokus pada tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan. Berbagai indeks penilaian menunjukkan hasil positif, seperti indeks perencanaan pembangunan nasional dari Bappenas yang meraih nilai 99,36 (sangat baik), SPIP dari BPKP dengan nilai 3,21 (baik), indeks SPBE dengan nilai 3,16 (baik), dan indeks integritas dari KPK sebesar 82,3 (baik).

Menyongsong tahun anggaran 2026, Lemhannas RI telah menyusun rencana kerja yang mengacu pada visi-misi pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yaitu 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas'. Tema RKP 2026, 'Kedaulatan Pangan dan Energi Serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif', menjadi landasan strategis. Keseluruhan visi-misi dan program kerja pemerintah telah dijabarkan dalam rencana strategis Lemhannas RI 2025-2029 dengan tujuan akhir 'Terwujudnya Ketahanan Nasional yang Tangguh Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia emas 2045'. "Lemhannas RI akan terus berkomitmen menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung program asta cita pemerintah guna mendukung visi Indonesia Emas 2045," tegas Gubernur Lemhannas RI.

Anggota Komisi I DPR RI, termasuk Andina Thresia Narang, B.Comm., memberikan apresiasi atas capaian Lemhannas RI. Andina menyoroti pentingnya program 'Lemhannas Goes to Campus' dalam menghadapi tantangan era digital yang meliputi disinformasi dan polarisasi sosial. Ia melihat program ini sangat efektif menjangkau generasi milenial dan Gen Z, yang akan mendominasi populasi produktif Indonesia ke depan. Dukungannya terhadap program ini diharapkan dapat meluas hingga ke daerah terpencil.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si., menekankan pentingnya pemahaman kebangsaan yang mendorong 'critical thinking' tanpa menciptakan doktrin. Menanggapi hal ini, Gubernur Lemhannas RI menegaskan bahwa Lemhannas RI menerapkan proses 'critical thinking' melalui diskusi dan penugasan untuk memperdalam pemahaman nilai-nilai kebangsaan. "Sehingga diharapkan pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan lahir dari sebuah kesadaran bahwa kita hidup di tengah persaingan global dan kita mempunyai kewajiban untuk membangun bangsa dengan keadilan," ujar Gubernur Lemhannas RI.

Di akhir RDP, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan harapan agar Komisi I DPR RI terus memberikan dukungan terhadap tugas dan mandat yang diemban oleh Lemhannas RI. (PERS)